BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Pos Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman dan telegraf yang berdiri sejak masa pemerintahan Belanda. Kantor Pos pertama di Indonesia adalah di Batavia yang didirikan oleh Gubernur Jenderal GW. Baron pada tanggal 26 Agustus 1746. Kemudian pada tahun 1864 Dinas Pos sebagai jawatan, berada dibawah pengawasan Directeur Producten en Civile Magazijen. Tahun 1875 Dinas Pos disatukan Dinas Telegraf dan disebut 'Post en Telegrafdienst'. Sejak tahun 1884 jawatan telepon disatukan sehingga mulai tahun 1906 disebut dengan "Post Telegraf en Telefondienst" (PTT).

PT. Pos Indonesia bermula mempunyai sebutan nama yaitu Jawatan PTT Republik Indonesia, yang berdiri secara resmi pada tanggal 27 September 1945 setelah dilakukan pengambil alihan Kantor Pusat PTT di Bandung oleh Angkatan Muda PTT (AMPTT) dari pemerintahan militer Jepang. Dalam peristiwa tersebut gugur sekelompok pemuda anggota AMPTT dan tanggal tersebut menjadi tonggak sejarah berdirinya Jawatan PTT Republik Indonesia dan diperingati setiap tahun sebagai Hari Bakti PTT dan yang kemudian menjadi Hari Bakti Parpostel.

Lalu Jawatan PTT mengalami perubahan status menjadi Perusahaan Negara

Pos dan Telekomunikasi (PN Postel) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 240 Tahun 1961, supaya memperoleh kebebasan didalam bergerak untuk yang lebih luas dalam mengembangkan suatu usaha. Kemudian pada tahun 1965 Perusahaan Negara Pos danTelekomunikasi (PN Postel) telah dipecah menjadi dua badan usaha yang berbeda yaitu Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro) dan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN telekomunikasi) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun dan Peraturan pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1965.

Bedasarkan Negara Pos dan Giro merupakan badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha dalam laporan penyelenggaraan Pos dan Giro yang berkantor pusat di Bandung. Tujuan pendirian Perusahaan Negara Pos dan Giro adalah untuk turut serta membangun ekonomi nasional dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur material dan spiritual.

Pada tahun 1978 status Perusahaan Negara Pos dan Giro telah dirubah menjadi Perusahaan Umum Pos dan Giro (Perum Pos dan Giro) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1978. Hal ini berhubungan dengan terjadinya perubahan-perubahan disempurnakan khususnya yang menyangkut tata cara pembinaan dan pengawasan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1984.

PT. Pos Indonesia telah menghadapi pertumbuhan dunia usaha yang semakin marak dan penuh persaingan dengan diperlukan penyesuaian status badan usaha yang

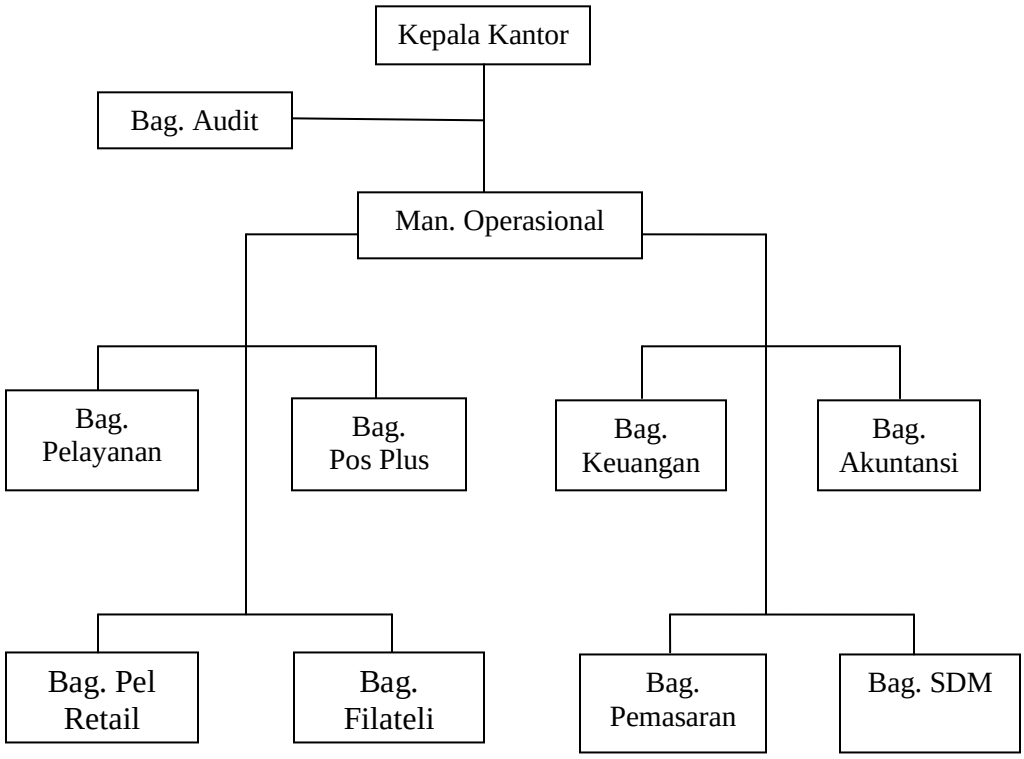
lebih fleksibel dan dinamis supaya mampu mengembangkan pelayanan jasa yang lebih baik.

Kemudian pada tahun 1995 PT. Pos Indonesia telah mengalami perubahan status dari yang semula sebagai Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro berubah menjadi PT. Pos Indonesia (Persero) yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1995 pada tanggal 5 Juni 1995.

4.1.2. Struktur Organisasi PT. Pos Indonesia

Struktur organisasi dibuat oleh perusahaan dengan maksud agar kordinasi dari masing-masing bagian atau divisi berjalan dengan lancar, selain itu untuk memudahkan pengendalian. Dengan demikian kesatuan aktivitas perusahaan dapat lebih terarah, yang pada akhirnya mempermudah pencapaian tujuan perusahan.

Setiap organisasi atau badan usaha mempunyai bentuk struktur organisasi atau susunan manajemen yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan setiap badan usaha mempunyai tujuan serta kondisi usaha yang berbeda-beda. Struktur organisasi PT. Pos Indonesia ada pada gambar 4.1



Sumber : PT. Pos Indonesia (Persero) Bandung

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
Divisi PT. Pos Indonesia Kantor Pos Bandung

4.1.3. Job Description

Deskripsi jabatan (job description) masing-masing bagian pada struktur organisasi PT. Pos Indonesia Kantor Pos Bandung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor :
    a. Mengawasi kegiatan penjualan, keuangan, pembelian, administrasi dan umum keadaan kegiatan sesuatu yang terpadu dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.
    b. Melakukan pengolahan data, analisis dan evaluasi atau hasil usaha dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna milik perusahaan.
    c. Secara periodic mengawasi system pengawasan internal dan melaksanakan pemeriksaan.
2. Bagian Audit :
    a. Memeriksa bagian –bagian keuangan, pelayanan dan keagenan, akuntansi, SDM, pengolahan, paket pos, teksifo, filateli, posplus, dan pemasaran.
    b. Pemerikasaan kas supervisor keuangan dan pemeriksaan sisi benda pos dan materai (BPM) supervesior keuangan.
    c. Pemeriksaan tertutup kas tahunan.
    d. Penyusunan laporan pemeriksaan.
    e. Pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP).

3. Manajer Oprasional :
    a. Mengelola arsip berdasarkan ketentuan yang berlaku.
    b. Melaksanakan kegiatan periklanan, pameran dan acara-acara resmi lainnya.
    c. Mengawasi, membina pengetahuan dan mutu kerja bawahannya.
    d. Menyampaikan saran kenaikan gaji / pangkat / jabatan karyawan bawahannya.
4. Bagian Pelayanan :
    a. Mengatur pelayanan loket penerimaan paket pos peka waktu meliputi paket pos biasa, wesel pos, giro pos, kilat khusus, EMS, Express Post, dan penjualan Benda Pos dan Matrai (BPM).
    b. Mengkoordinasikan pekerjaan penerimaan dari kantor lain termasuk pekerjaan pembukuan atau pencatatan pekerjaan.
    c. Mengkoordinir persiapan paket pos serta menjaga kelancarannya. .
    d. Menyiapkan konsep surat-menyurat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pos.
5. Bagian Pelayanan Pos Plus
    a. Menerima / menyelesaikan pengaduan pelanggan.
    b. Memeriksa pertanggungan pengaduan.
    c. Memeriksa laporan pengaduan ditambah lampiran serta memeriksa penyimpangan jasa layanan pos.

6. Bagian pelayanan ritel/ keagenan :
    a. Memeriksa seluruh neraca loket dan dokumen sumber setelah diyakini akan kebenarannya.
    b. Memeriksa seluruh neraca loket bagian peleyanan retail / keagenan dan dokumen sumber yang berkaitan dengan mutasi pada ahli yang berkaitan.
    c. Memeriksa pencocokan *surplus minus* tabungan Batara dan tabungan Budaya, serta menandatangani laporannya.
    d. Memerikasa pembukuan Tabungan Kesejahteraan Keluarga (TEKESRA) dan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (KUKESRA) yang akan dicocokan dengan bagian akuntansi, memeriksa laporan surplus TAKESRA dan KUKESRA yang akan dikirim ke BNI 46, serta menandatangani laporannya.
    e. Memeriksa kebenaran dan menandatangani laporan pensiun.
7. Bagian Filateli :
    a. Mengawasi penjualan benda-benda pos.
    b. Menyusun target unit tahunan
    c. Melakukan pemeriksaan kas berdasarkan pemeriksaan administrasi.
8. Bagian Keuangan :
    a. Menerima, menyiapkan, membayar atau mengeluarkan uang dan surat berharga, menerima dan memberikan panjar kas ke loket-loket atau

kasir, menerima dan menyiapkan pengiriman uang serta membuat neraca harian kas.

b. Menerima, menyiapkan, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan serta penata usahaan benda pos dan matrai, membuat neraca harian benda pos dan matrai termasuk buku atau daftar rekapitulasi penjualan.

c. Mengawasi peredaran benda pos materai di loket-loket, mesin perangko dan system pemperangkoan lainnya baik yang digunakan diloket maupun oleh publik, serta melaksanakan penata usahaan dan pertanggungannya.

d. Melaksanakan penyetoran dan pengambilan ke atau dari bank yang telah ditetapakan dan pentransferan ke rekening direktur keuangan bandung, serta menjaga batas maksimum saldo kas.

9. Bagian Akuntansi :

a. Memeriksa dokumen sumber pembukuuan.

b. Mengklasifikasikan data dan dokumen sumber untuk melakukan persiapan pembukuan.

c. Membukukan dalam buku harian, buku besar dan jurnal.

d. Menyusun neraca dan laporan keuangan.

e. Mengisi, membukukan , menyiapkan dan mengirimkan buku kas umum dan register pembantunya.

10. Bagian Pemasaran :

    a. Menyusun rencana kegiatan pemasaraan semua jasa pos dan keagenan serta penyusunan angggaran
    b. Melakukan penelitian pasar dan menganalisa setiap masukan baik berdasarkan pengamatan, usulan atau keluhan pelanggan.
    c. Melaksanakan negosiasi dan penjualan serta mengusulkan penafsiran atas produk tertentu atau besarnya potongan.
    d. Melakukan pembinaan pelanggan dan menjalin kerja sama dengan pihak lain serta menyelanggarakan jumpa pelanggan bagi konsumen dareah kerjannya.
    e. Melakukan kegiatan promosi.

11. Bagian SDM

    a. Melakukan dan mengevaluasi pelaksanaan mutasi dan *rolering* pegawai.
    b. Merancanakan, mengembangkan dan mengatur sumber daya manusia dalam lingkup kerja kantor pos bandung
    c. Mengurus surat-menyurat dan naskah kepegawaian serta hal lain yang menyangkut hak dan kewajiban pegawai.
    d. Melaksanakan tata usaha SDM , pembayaran gaji atau pension, tunjangan, menyiapkan dan menyelesaikan

4.2 Tingkat Rasio Keuangan PT. Pos Indonesia (Persero)

Suatu laporan keuangan yang disusun perlu diadakan suatu penganalisaan untuk memudahkan para pembuat dan pemakai laporan keuangan dalam menganalisis kondisi dan perkembangan perusahaan serta dapat mengantisipasi kondisi yang terjadi dimasa yang akan datang. Cara mengukur kesehatan keuangan adalah berdasarkan analisis rasio keuangan yang diantaranya yaitu rasio rentabilitas, likuiditas, solvabilitas. Berikut ini adalah cara perhitungan rasio keuangan yang terdiri dari rasio rentabilitas, likuiditas, solvabilitas :

a. Cara perhitungan rasio rentabilitas (Return on Asset)

$$\text{Rentabilitas} = \frac{\text{Laba}}{\text{Total modal}} \times 100\ \%$$

Tabel 4.1
Cara perhitungan rasio rentabilitas
PT. Pos Indonesia (Persero)
Periode 2006 – 2010

Periode	Laba	Total Modal	Hasil
2006	132.482.896.860	450.025.331.019	29,4 %
2007	20.421.770.167	453.196.045.122	45,0 %
2008	68.827.840.019	446.325.953.360	15,4 %
2009	99.144.580.530	425.000.000.000	23,3 %
2010	45.650.890.959	425.000.000.000	10,7 %

Sumber :Laporan keuangan neraca dan laba rugi (diolah)

b. Cara perhitungan rasio Likuiditas (current ratio)

$$\text{Likuiditas} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\ \%$$

Tabel 4.2
Cara perhitungan rasio Likuiditas
PT. Pos Indonesia (Persero)
Periode 2006 – 2010

Periode	Aktiva Lancar	Hutang Lancar	Hasil
2006	2.576.527.449.039	2.581.585.184.195	99,8 %
2007	4.012.709.888.146	4.044.346.795.619	99,2 %
2008	5.940.001.773.525	6.081.848.077.218	97,6 %
2009	3.459.759.168.992	3.569.148.279.897	96,9 %
2010	3.590.176.887.332	3.732.785.962.649	96,1 %

Sumber : Laporan keuangan neraca (diolah)

c. Cara perhitungan solvabilitas

$$\text{Solvabilitas} = \frac{\text{Total aktiva}}{\text{Total hutang}} \times 100\ \%$$

Tabel 4.3
Cara perhitungan rasio Solvabilitas
PT. Pos Indonesia (Persero)
Periode 2006 – 2010

Periode	Total Aktiva	Hutang Aktiva	Hasil
2006	3.080.145.140.334	2.956.454.374.397	104,1 %
2007	4.708530.667.259	4.327.628.249.669	108,8 %
2008	4.230.991.312.201	6.351.062.139.840	66,6 %
2009	6.665.238.008.178	3.834.245.481.833	173,8 %
2010	4.445.008.965.732	4.005.192.045.165	110,9 %

Sumber : Laporan keuangan neraca (diolah)

Berikut adalah hasil perhitungan rasio laporan keuangan PT. Pos Indonesia selama tahun 2006-2010 yang terdiri dari rasio rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas.

Tabel 4.4
Hasil Perhitungan Analisis Rasio
Laporan Keuangan PT. Pos Indonesia (Persero)
Periode 2006 – 2010

Periode	Rentabilitas	Likuiditas	Solvabilitas
2006	29,4 %	99,8 %	104,1 %
2007	4,50 %	99,2 %	108,6 %
2008	15,4 %	97,6 %	66,6 %
2009	23,3 %	96,9 %	173,8 %
2010	10,7 %	96,1 %	110,9 %

Sumber : laporan keuangan neraca (diolah)

Dari analisis rasio keuangan untuk laporan keuangan PT. Pos Indonesia (Persero) diatas terlihat adanya perubahan pada rasio rentabilitas, likuiditas, solvabilitas untuk periode 2006-2010.

4.2.1 Perkembangan Tingkat Kesehatan Keuangan Berdasarkan Analisis Rasio Laporan Keuangan

Untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan perusahaan adalah berdasarkan perbandingan analisis rasio keuangan dengan bobot kesehatan keuangan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Berikut ini adalah hasil perbandingan analisis rasio keuangan menggunakan

rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas dengan bobot kesehatan keuangan yang telah ditetapkan oleh Keputusan BUMN.

Tabel 4.5
Analisis rasio rentabilitas dan hasil bobot kesehatan keuangan
Periode 2006 – 2010

Periode	Rentabilitas	Skor	Tingkat Kesehatan
2006	29,4 %	**CCC** (20 < total skor ≤ 30)	TIDAK SEHAT
2007	45,0 %	**BB** (40 < total skor ≤ 50)	KURANG SEHAT
2008	15,4 %	**CC** (10 < total skor ≤ 20)	TIDAK SEHAT
2009	23,3 %	**CCC** (20 < total skor ≤ 30)	TIDAK SEHAT
2010	10,7 %	**CC** (10 < total skor ≤ 20)	TIDAK SEHAT

Sumber : laporan keuangan (diolah)

Berdasarkan analisis rentabilitas diatas maka hasil bobot kesehatan keuangan selama tahun 2006-2010 dinyatakan tidak sehat. Karena selama tahun 2006-2010 hasil bobot analisis rentabilitas dibawah rata-rata skor ≤50. Pada tahun 2007 mengalami sedikit kenaikan bobot rentabilitas yaitu sebesar 4,50% namun tingkat kesehatan masih dalam keadaan kurang sehat.

Tabel 4.6
Analisis rasio likuiditas dan hasil bobot kesehatan keuangan
Periode 2006 – 2010

Periode	Likuiditas	Skor	Tingkat Kesehatan
2006	99,8 %	**AAA** Total skor lebih besar dari 95	SEHAT
2007	99,2 %	**AAA** Total skor lebih besar dari 95	SEHAT
2008	97,6 %	**AAA** Total skor lebih besar dari 95	SEHAT
2009	96,9 %	**AAA** Total skor lebih besar dari 95	SEHAT
2010	96,1 %	**AAA** Total skor lebih besar dari 95	SEHAT

Sumber : laporan keuangan (diolah)

Berdasarkan analisis likuiditas diatas maka hasil bobot kesehatan keuangan selama tahun 2006-2010 dinyatakan sehat. Karena selama tahun 2006-2010 hasil bobot analisis likuiditas diatas rata-rata 90% dan hampir mendekati 100% .bobot tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 99,8% dan terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 96,1%

Tabel 4.7
Analisis rasio solvabilitas dan hasil bobot kesehatan keuangan
Periode 2006 – 2010

Periode	Solvabilitas	Skor	Tingkat Kesehatan
2006	104,1 %	**AAA** Total skor lebih besar dari 95	SEHAT
2007	108,6 %	**AAA** Total skor lebih besar dari 95	SEHAT
2008	66,6 %	**A** (65 < total skor ≤ 80)	SEHAT
2009	173,8 %	**AAA** Total skor lebih besar dari 95	SEHAT
2010	110,9 %	**AAA** Total skor lebih besar dari 95	SEHAT

Sumber : laporan keuangan (diolah)

Berdasarkan analisis solvabilitas diatas maka hasil bobot kesehatan keuangan selama tahun 2006-2010 dinyatakan Sehat.Karena selama tahun 2006-2010 hasil bobot analisis likuiditas diatas rata-rata 95%. Dalam ketiga analisis diatas pada analisis solvabilitas memperoleh bobot yang sangat baik dan sehat. Pada tahun 2008 mengalami penurunan dengan skor < 80 namun tetap dalam keadaan sehat.

4.2.1 Upaya PT. Pos Indonesia Untuk Mempertahankan Tingkat Kesehatan Keuangan

Dengan menggunakan analisis rasio laporan keuangan dapat mengetahui tingkat kesehatan perusahaan pada PT. Pos Indonesia yaitu dengan cara membandingkan setiap tahunnya.

PT. Pos Indonesia ditinjau dari segi rentabilitas selama tahun 2006-2010 dinyatakan tidak sehat dikarenakan total laba lebih rendah dari total modal sehingga bobot (total skor) dibawah rata-rata sesuai ketentuan KEP-100/MBU/2002. Dan apabila ditinjau dari segi likuditas dan solvabilitas selama 2006-2010 dinyatakan sehat.

maka untuk mendapatkan tingkat kesehatan keuangan yang baik (sehat) maka harus memiliki tingkat rasio keuangan yang baik pula. Maka dari itu untuk tingkat rasio keuangan yang tinggi perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi, akan tetapi untuk tingkat rasio keuangan yang rendah ataupun yang mengalami penurunan harus mendapat perhatian yang lebih agar periode-periode yang datang jauh lebih baik atau mengalami terus peningkatan.

Pihak PT.Pos Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan tingkat kesehatan keuangan, yaitu dengan cara :

1. Memperoleh laba sebanyak-banyaknya dengan membuat produk baru seperti pos-pay.
2. Bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta.
3. Menambahkan modal dari pemerintah dan pemegang saham lain.